

PENGUATAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PERIKANAN TANGKAP (STUDI KASUS DESA LATUHALAT, KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU)

Lilian Sarah Hiariey¹
Nesti Rostini Romeon²
¹UPBJJ-UT Ambon
² Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
e-mail: lilian@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The Collective Business Group (KUB) of fisheries Village Latuhalat is a new step in the fishing community to improve the welfare of living independently because most of the population depend their earnings on the sea and exposed to the problem of poverty. Therefore, it is necessary to find a strategy which leads to an increase in the role of public institutions by strengthening research KUB aims: 1) Assess the capacity of KUB's fisheries in promoting member; 2) Identify the factors that can support and hinder the strengthening of KUB fisheries and 3) Develop strategies and programs to strengthen KUB's fisheries. Qualitative research methods using technical methods of Participatory Rural Appraisal (PRA). Results showed that KUB constraints and needs in developing fisheries catch. Factors that hamper the strengthening of KUB are: (1) The condition of the community, (2) business improvement member is not yet optimal; and (3) the Government in granting program is participatory and KUB yet untapped to empower fishermen. Supporting factors, among others: (1) The fishery potential is quite large; (2) the establishment of institutional KUB Risna and Sibu-Sibu; (3) the availability of Fish Landing Ports (PPI) as a production catches;(4) Support Government policy through an increase in fish production. While inhibiting factor among others: (1) production decreased catches; (2) The fishermen have consumptive life pattern; (3) do not have the skills to process the fish when the fish are abundant; (4) the implementation of organizational management and production operations management low arrest. KUB proposed strategies can include: (1) Increasing the capacity of members and administrators; (2) Mentoring institutional management; (3) The development of networking; (4) Procurement of technical training arrests; (5) The assistance promotion in the management of fishery resources based local wisdom; and (6) Acquisition of facilities and infrastructure arrests.

Keywords: collective business group, institutional management, participatory rural appraisal, strengthening, fishing.

ABSTRAK

Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap di Desa Latuhalat merupakan satu langkah baru dalam masyarakat nelayan untuk mengembangkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Sebagian besar masyarakat desa tersebut menggantungkan kelangsungan hidupnya dari penghasilan laut dan dihadapkan pada masalah kemiskinan. Perlu dicari strategi yang mengarah pada peningkatan peranan lembaga masyarakat melalui penguatan KUB. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kapasitas KUB perikanan tangkap dalam meningkatkan usaha anggota; 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan

menghambat penguatan KUB perikanan tangkap; dan 3) menyusun strategi dan program penguatan KUB perikanan tangkap. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif teknis Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dan kebutuhan KUB dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap. Faktor-faktor yang menghambat penguatan KUB adalah: (1) Kondisi komunitas. (2) Belum optimalnya peningkatan usaha anggota; dan (3) Pemerintah dalam pemberian program belum bersifat partisipatif dan KUB belum dimanfaatkan untuk memberdayakan nelayan. Faktor-faktor pendukung, antara lain: (1) potensi perikanan tangkap cukup besar; (2) terbentuknya kelembagaan KUB Risna dan Sibu-Sibu; (3) tersedianya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai tempat produksi hasil tangkapan; (4) Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah melalui program peningkatan produksi perikanan. Sedangkan Faktor-faktor penghambat antara lain: (1) produksi hasil tangkapan menurun; (2) nelayan memiliki pola hidup konsumtif; (3) Nelayan tidak memiliki ketrampilan dalam mengolah ikan saat ikan melimpah; (4) penerapan manajemen organisasi dan manajemen operasi produksi penangkapan rendah. Strategi yang dapat diusulkan KUB antara lain: (1) Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus; (2) Pendampingan manajemen kelembagaan; (3) Pengembangan jejaring; (4) Pengadaan pelatihan teknis penangkapan; (5) Pendampingan dan promosi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kearifan lokal dan (6) Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan.

Kata kunci: kelompok usaha bersama, manajemen kelembagaan, *participatory rural appraisal*, penguatan, perikanan tangkap.

Desa Latuhalat berada di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Desa ini merupakan desa yang berada di kawasan ekosistem pesisir dengan beragam kekayaan hayati, sumberdaya alam perikanan, mineral dan bahan galian, yang selama ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Desa Latuhalat merupakan salah satu desa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total produksi perikanan di kawasan perairan Teluk Ambon Luar, yakni sebesar 1.775,91 ton per tahun dari 4.253,63 ton per tahun total produksi perikanan di Teluk Ambon Luar (Dinas Kelautan dan Perikanan Ambon, 2008). Desa ini memiliki armada penangkapan *purse seine* lebih banyak dibandingkan dengan armada penangkapan di desa lainnya. Di desa Latuhalat, jenis alat tangkap yang menonjol adalah pancing tangan, sedangkan jika ditinjau dari segi produktifitas alat tangkap jenis alat pancing tonda dan purse seine merupakan sumbangan cukup besar dalam produksi hasil tangkapan untuk jenis-jenis ikan pelagis kecil dan besar (Dinas Kelautan dan Perikanan Ambon, 2008).

Peran kelembagaan lokal sangat penting dalam proses berpartisipasi. Pendekatan pengembangan kelompok-kelompok kecil dimasyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan nelayan di Desa Latuhalat adalah strategi yang mengarah pada kelompok usaha bersama, yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan penciptaan lapangan kerja.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang ada di desa Latuhalat terdiri atas usaha perikanan tangkap dan pemasaran. KUB

Perikanan Tangkap merupakan bentuk kelembagaan perikanan yang bergerak dalam bidang usaha penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produk perikanan, pemasaran hasil perikanan maupun usaha pendukung kegiatan perikanan tangkap (Kusnadi, 2009).

Dengan dibentuknya KUB perikanan tangkap di desa Latuhalat, tentunya menjadi satu langkahbaru masyarakat nelayan dalam mengembangkan kesejahteraan secara mandiri. Kondisi masyarakat nelayan didaerah ini memang perlu diperhatikan mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari penghasilan laut.Realitas yang ada saat ini menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam pengembangan usaha perikanan di desa ini, yaitu: (1) keterbatasan biaya maupun kondisi yang ada didaerah ini terkadang kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan modal yang cukup banyak, mulai dari alat pancing yang masih tradisional, dan perahu tangkap yang belumdilengkapi dengan fasilitas yang modern, sehingga usaha perikanan tangkap untuk saat ini hanya dapat diakses oleh nelayan dari golongan menengah ke atas; (2) dalam pengelolaan usaha perikanan masih terdapat rendahnya sumberdaya manusia hal ini ditunjukkan dengan belum dikembangkan usaha pengolahan hasil perikanan; (3) belum ada pembentukan koperasi perikanan sebagai wadah pengembangan kemandirian usaha dalam kelompok tersebut serta peningkatan kesejahteraan nelayan; (4) rendahnya kemampuan pasar dalam menyerap produksi perikanan.

Dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan suatu kajian untuk merancang dan mengembangkan suatu kelompok nelayan yang kuat. Dengan kelompok nelayan yang kuat diharapkan mampu menyusun kegiatan, program kerja dan sasaran sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dan kelompok nelayan juga harus mampu untuk melihat faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam perkembangan usaha perikanan tangkap. Kuatnya suatu kelompok nelayan diharapkan nantinya mampu menjadi suatu wadah bagi nelayan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui usaha perikanan tangkap.

Faktor penentu dalam penguatan KUB perikanan tangkap,salah satunya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam mengelola usaha perikanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian dari nelayan sendiri dalam mengelola usaha perikanannya. Hal ini bertujuan agar nelayan dapat lebih berdaya secara menyeluruh dalam hal perencanaan dan keterlibatan langsung dalam menentukan berbagai kebutuhan dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap secara partisipatif. Metode *PRA* initelah menghasilkan potensi, permasalahan dan kebutuhan nelayan serta alternatif pemecahan masalah sebagai strategi dalam bentuk pilihan aksi program yang berkaitan dalam penguatan KUB.

METODE

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Studi Dokumentasi, yaitu proses mengumpulkan data sekunder, khususnya potensi perikanan tangkap, intervensi program pemerintah dalam program perikanan tangkap; (2) Observasi partisipasi (pengamatan berperanserta), untuk mengetahui dan merasakan secara langsung berbagai permasalahan dalam perikanan tangkap dan kapasitas kelompoknya; (3) Wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan responden kepala bidang perikanan, petugas penyuluh lapang (PPL), kepala desa dan responden sebanyak 22 orang anggota KUB;(4) Diskusi dengan responden atau informan yang mewakili anggota dan pengurus Kelompok Usaha Bersama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintahan desa, dan *stakeholder* terkait.

Penyusunan program penguatan KUB dilakukan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* melalui *Fokus Group Discussion* (FGD) melalui tahapan sebagai berikut:

1) Menyusun rumusan masalah berdasarkan informasi, data hasil observasi partisipasi, wawancara mendalam dan diskusi; 2) Identifikasi peserta FGD meliputi: anggota dan pengurus Kelompok Usaha Bersama, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Dinas/instansi yang terkait dengan perikanan tangkap; dan 3) Menyusun rencana aksi program dalam penguatan Kelompok Usaha Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN Lokasi dan Sumberdaya Alam

Desa Latuhalat adalah desa pesisir yang seluruhnya dikelilingi oleh lautan dan hanya sebagian yang berbatasan dengan daerah daratan lainnya. Pemanfaatan lahan di Desa Latuhalat diperuntukan untuk pemukiman dan berladang, sedangkan untuk daerah pesisir dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata. Pada umumnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal bertumpu pada usaha perikanan tangkap.

Garis batas wilayah Latuhalat adalah sebelah timur bebatasan dengan Negeri Airlow, sebelah timur laut berbatasan dengan Negeri Seilale, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah utara dengan Teluk Ambon. Luas Desa Latuhalat adalah ± 285 hektar, jarak pantai ke gunung 4 kilometer, jarak dari Latuhalat ke Seilale 2 kilometer, dan dari Latuhalat ke Airlow 1 kilometer (Anonim, 2013).

Arus dan gelombang yang terjadi di perairan Desa Latuhalat dipengaruhi oleh musim, yaitu musim timur dan musim barat, pada musim timur terjadi ombak dengan ketinggian bisa mencapai 3 tiga sampai empat meter. Pada musim ini nelayan memanfaatkan jalur Teluk Ambon bagian luar sebagai tempat untuk bersandarnya kapal dan perahu, sedangkan untuk musim barat mereka memanfaatkan pesisir selatan. Kualitas air juga dipengaruhi oleh kedua musim tersebut. Topografi Desa Latuhalat merupakan daerah dataran dan berbukit, jenis tanah di Desa Latuhalat rata rata tanah liat berpasir (Anonim, 2013).

Kondisi Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dikaji di desa Latuhalat adalah KUB Risna yang tergolong KUB lama dan KUB Sibu-Sibu yang tergolong KUB baru.KUB ini bergerak dalam bidang usaha penangkapan *purse seine*, KUB ini merupakan kelembagaan nelayan yang berasal dari keinginan masyarakat nelayan di Desa Latuhalat. Tujuan dibentuknya KUB perikanan tangkap adalah meningkatkan taraf hidup nelayan dan menjadi salah satu usaha yang produktif khususnya sektor perikanan tangkap serta diharapkan menjadi wadah bagi nelayan untuk memfasilitasi kebutuhan di bidang perikanan tangkap.

Diskusi kelompok menghasilkan kendala dan kebutuhan KUB dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap sebagai upaya penguatan kelembagaan KUB. Hal ini dilihat dari kapasitas anggota Anak Buah Kapal (ABK), pengurus serta kinerja dari KUB itu sendiri. Mata pencaharian utama dari ABK ke dua KUB ini adalah usaha perikanan tangkap dan pada umumnya ABK KUB ini memiliki usaha lain yaitu Petani. Pada umumnya tingkat pendidikan ABK KUB ini adalah lulusan SD. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap aktivitas melaut yang masih bersifat tradisional dan sederhana. Penangkapan ikan yang dilakukan masih minim penggunaan teknologi dan hanya mengandalkan pengalaman yang diwariskan turun temurun. Selain itu, ABK dari KUB Risna dan Sibu-Sibu umumnya tidak memiliki keterampilan dalam menciptakan matapencarian alternatif ketika

tidak melaut akibat cuaca buruk, sehingga dalam kondisi demikian, ABK tersebut tidak memiliki penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Menurut Saroinsong (2012), kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka akan berdampak terhadap kinerja dari KUB menjadi rendah.

ABK dari ke dua KUB ini berasal dari desa Latuhalat. Kesamaan bahasa memudahkan setiap anggota kelompok ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Begitu juga dengan suku dan agama. Kesamaan dalam suku dan agama dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam kelompok nelayan yang dapat diakibatkan karena perbedaan akar budaya dan pandangan hidup. Menurut Wahab dan Azis (2008), kebudayaan setiap masyarakat pastilah berbeda dengan kebudayaan masyarakat lain. Hal ini disebabkan kebudayaan tersebut berbeda pada tempat dan kondisi tertentu, norma sosial yang berbeda-beda ukurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perbedaan-perbedaan inilah yang memungkinkan terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan budaya pada suatu kelompok akan mudah mengarahkan pada tujuan bersama dan dapat meminimalisir konflik.

Struktur organisasi yang dibentuk oleh KUB Risna dan KUB Sibu-Sibu adalah struktur berdasarkan hubungan kekerabatan. Merangkapnya kerja oleh setiap pengurus KUB ini menyebabkan fungsi dari masing-masing pengurus tidak maksimal. Perkembangan Kelembagaan KUB Risna dan Sibu-Sibu yang sedang berjalan dapat dikatakan lamban jika kita lihat dari perkembangan hasil produksi perikanan tangkap. Menurut Pace & Faules (2006), dalam konteks penyelenggaran manajemen organisasi, kejelasan kedudukan dan uraian tugas seseorang dalam struktur organisasi akan mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Apabila fungsi pengurus tidak maksimal maka akan mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas organisasi.

Lambatnya perkembangan kelembagaan KUB ini disebabkan karena belum adanya pengetahuan di bidang manajemen organisasi dan pelayanan kepada anggota (ABK). Kurangnya pengetahuan di bidang manajemen organisasi terlihat dari mekanisme yang diterapkan dalam penyerapan program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah, akibatnya bantuan yang diberikan tidak memberikan hasil yang optimal dalam peningkatan usaha perikanan tangkap. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya apabila manajemennya baik dan teratur maka tercapainya tujuan kegiatan (Anonim, 2014).

Seorang pemimpin harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan tenaga kerja (ABK) dalam jumlah yang tepat. Jika jumlah ABK terlalu sedikit sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan, sebaliknya jika jumlah ABK terlalu banyak akan menambah biaya produksi penangkapan. Berdasarkan penelitian Pratama, Dwi & Imam (2016), produksi hasil tangkapan *Purse Seine* dipengaruhi oleh jumlah ABK. Kegiatan operasional *Purse Seine* menggunakan ABK sebanyak 25 sampai dengan 35 orang, dimana tiap ABK sudah memiliki tugas sendiri. Jika dalam kegiatan penangkapan suatu armada kekurangan ABK tentunya menganggu operasional penangkapan sehingga semakin banyak ABK dalam jumlah yang tepat yaitu 35 orang semakin mempermudah kegiatan operasional penangkapan ikan dan berdampak pada peningkatan hasil penangkapan.

Faktor-Faktor yang Dapat Mendukung dan Menghambat Penguatan Kelembagaan KUB

Faktor-faktor yang dapat mendukung penguatan kelembagaan KUB dapat dilihat dari beberapa hal,yaitu:

1. Kondisi komunitas

Letak Desa Latuhalat yang cukup mudah dijangkau dari Kota Ambon memudahkan untuk mengakes sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi lokal seperti bank, instansi-instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lain. Disamping itu tersedianya sarana transportasi baik jalan maupun angkutan yang memadai memudahkan dijangkaunya Desa Latuhalat. Selain itu, terdapat Pelabuhan Pendaratan Ikan yang digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan dilaut sampai membongkar hasil tangkapan, serta kegiatan pemasaran hasil tangkapan. Sedangkan untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan dilakukan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI sangat membantu nelayan dalam menjual hasil tangkapan terutama apabila hasil penangkapan relatif banyak. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dan memadai merupakan syarat mutlak bagi terciptanya usaha perikanan yang baik. Untuk menunjang kelancaran usaha perikanan laut tersebut diperlukan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang kelancaran usaha perikanan dalam memasarkan hasil tangkapan maupun aktifitas penunjang lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Ambon, 2008).

Total produksi perikanan tangkap di kawasan ini sebesar 1.775,91 ton per tahun dimana produksi sumberdaya ikan pelagis kecil sebanyak 1.446 ton/thn, pelagis besar 2.31 ton/thn dan demersal 327,60 ton/thn. Oleh karena di desa ini memiliki armada penangkapan purse seine lebih banyak dibandingkan dengan armada penangkapan di desa lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Ambon, 2008). Potensi perikanan yang cukup besar harus didukung dengan penyediaan sarana rantai dingin agar dapat mempertahankan mutu dalam memasarkan hasil perikanan dan menambah nilai jual hasil tangkapan.

2. Kelembagaan

Adanya Kelembagaan KUB Risna dan Sibu-Sibu merupakan faktor pendukung keberhasilan program pengembangan perikanan tangkap. Hal ini karena KUB berfungsi sebagai unsur masyarakat yang dapat berperanserta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna program, sehingga melalui KUB Risna dan Sibu-Sibu program peningkatan produksi perikanan dapat dilaksanakan di Desa Latuhalat. Tujuan dibentuknya KUB adalah meningkatkan taraf hidup nelayan. KUB Risna dan Sibu-Sibu diharapkan menjadi wadah bagi nelayan untuk memfasilitasi kebutuhan di bidang perikanan tangkap.

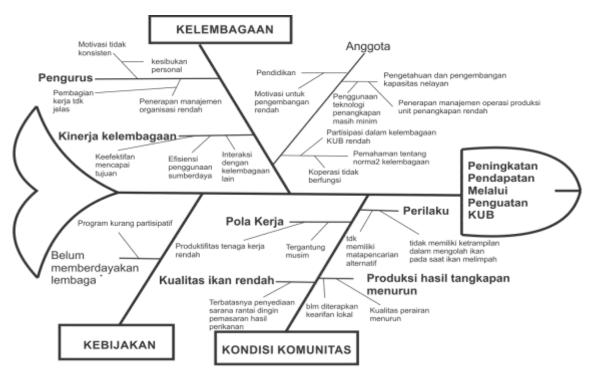
Menurut Mutiara (2008), kehadiran KUB merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber-sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

3. Kebiiakan

Perkembangan perikanan tangkap sangat memberikan arti sejalan dengan salah satu Pilar Pembangunan Desa Latuhalat yaitu "membangun ketahanan ekonomi rakyat dengan jalan membentuk berbagai kelompok usaha yang bergerak di sektor perikanan". Dukungan dari

Pemerintah terhadap perkembangan perikanan tangkap ini dapat dilihat dari program-program peningkatan produksi perikanan yang telah diberikan kepada nelayan, baik itu program bantuan dana bergulir, bantuan sarana dan prasarana perikanan maupun bantuan pelatihan. Menurut Arnawa, Purnama & Gede (2016), dampak pemberian bantuan sarana perikanan tangkap dapat meningkatkan pendapatan nelayan sebesar 2,6287%, dimana pendapatan masyarakat nelayan bergantung juga terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP) yang terdapat di lautan.

Berdasarkan hasil diskusi selama melaksanakan kegiatan penguatan KUB bersama dengan anggota dan pengurus KUB Risna dan Sibu-Sibu, Kepala Bidang Pengelolaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Perguruan Tinggi (Universitas Terbuka Ambon), dan Penyuluh Perikanan, telah teridentifikasi permasalahan dalam faktor-faktor yang menghambat penguatan kelembagaan KUB yang dikelompokkan dalam tiga permasalahan, seperti tertuang dalam Gambar 1 yaitu Diagram tulang ikan yang menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari permasalahan penguatan KUB, dengan berbagai penyebabnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Purba (2008): Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya.



Gambar 1. Diagram Tulang Ikan

Gambar Diagram Tulang Ikan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

 Anggota; permasalahan yang ditemui adalah: pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi motivasi dalam pengembangan perikanan tangkap; pemahaman tentang norma-norma kelembagaan yang masih rendah, sehingga dalam pengembalian dana pada koperasi, sebagian besar anggota yang meminjam tidak dapat mengembalikan; pengetahuan dan pengembangan kapasitas nelayan masih terbatas, sehingga nelayan dalam menerapkan manajemen operasi produksi unit penangkapan rendah dan penggunaan teknologi penangkapan masih minim.

- b. Pengurus; permasalahan yang ditemui adalah:penerapan manajemen organisasi rendah sehingga pembagian kerja yang tidak jelas; dan motivasi yang tidak konsisten yang terlihat dari kesibukan masing-masing pengurus.
- c. Kinerja Kelembagaan, terdapat permasalahan: keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuan; efisiensi penggunaan sumberdaya; dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan kelembagaan lain.

2. Kondisi Komunitas

- a. Pola kerja. Permasalahan yang ditemui adalah: nelayan memiliki ketergantungan yang tinggi pada kegiatan melaut dan menjadi sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun realitas yang terjadi, usaha tersebut tergantung musim, terdapat kerusakan ekositem pesisir-laut sehingga berdampak terhadap penghasilan nelayan. Kondisi tersebut merupakan kebutuhan mendesak agar nelayan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari kegiatan melaut dengan menciptakan sumber pendapatan melalui matapencarian alternatif demi meningkatkan pendapatan nelayan.
- b. Produksi hasil tangkapan menurun, terdapat permasalahan: kualitas perairan menurun yang disebabkan eskploitasi intensif, pengoperasian alat tangkap yang merusak ekosistem laut, pencemaran laut dari wilayah daratan; belum diterapkan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- c. Perilaku, terdapat permasalahan: nelayan memiliki perilaku atau pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder; nelayan tidak memiliki keterampilan dalam mengolah ikan pada saat ikan melimpah sehingga hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang banyak tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.
- d. Kualitas ikan rendah, terdapat permasalahan : terbatasnya sarana rantai dingin pemasaran hasil perikanan sehingga nilai jual hasil tangkapan rendah karena mutu rendah.

3. Kebijakan

Belum memberdayakan lembaga, terdapat permasalahan: Pemerintah dalam pemberian program belum melakukan pendekatan pelaksanaan program yang partisipatif atau belum memberdayakan nelayan.

Strategi dan Program Penguatan Kelembagaan KUB

Berdasarkan hasil FGD selanjutnya dibuat rumusan strategi penguatan kelembagaan KUB. Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya intervensi sosial pada tataran mikro (individu dan keluarga) dan tataran meso (kelompok-kelompok kecil) yaitu kepada nelayan dan kelembagaan KUB, dengan melibatkan partisipasi anggota dan pengurus dalam perancangan strategi dan aksi, diharapkan rancangan tersebut dapat berjalan secara efektif. FGD dapat dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: (1) Membahas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program penguatan kelembagaan KUB dan pengembangan usaha; (2) Mencari model pengembangan kelembagaan

yang partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi lokal dan sumber daya yang ada berdasarkan pemikiran dan kesepakatan bersama seluruh stakeholder; (3) Menyusun rancangan aksi atau pengembangan program penguatan kelembagaan KUB agar di masa yang akan datang program berjalan efektif.

SIMPULAN

Dari hasil kajian tentang Penguatan Kelembagaan KUB perikanan tangkap di desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Kapasitas Kelembagaan KUB dalam meningkatkan usaha anggota dalam perikanan tangkap belum optimal, disebabkan (1) lemahnya kinerja kelembagaan KUB, (2) rendahnya partisipasi anggota, dan (3) rendahnya pengetahuan akan norma yang berlaku di KUB. Rendahnya keterampilan dalam menciptakan mata pencaharian alternatif dan lemahnya aspek organisasi ditunjukkan dengan (1) tidak memiliki perencanaan program kerja yang baik, (2) belum ada pembagian tugas yang jelas, (3) tabungan kelompok tidak kelola dengan baik, dan (4) tidak ada pencatatan kegitan perikanan dari anggota oleh pengurus.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penguatan kelembagaan KUB: Faktor-faktor yang mendukung penguatan KUB adalah (1) potensi perikanan tangkap cukup besar, terbentuknya kelembagaan KUB Risna dan Sibu-Sibu, (2) tersedianya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), dan (3) dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah terhadap nelayan tangkap melalui program-program peningkatan produksi perikanan. Faktor-faktor yang menghambat penguatan KUB adalah(1) produksi hasil tangkapan menurun, (2) nelayan memiliki pola hidup konsumtif, (3) tidak memiliki ketrampilan dalam mengolah ikan saat ikan melimpah, dan (4) penerapan manajemen organisasi dan manajemen operasi produksi penangkapan rendah.

Strategi rencana Pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui penguatan kelembagaan KUB adalah peningkatan kapasitas anggota dan pengurus, pendampingan manajemen kelembagaan, pengembangan jejaring, pengadaan pelatihan teknis penangkapan, pendampingan dan penyebarluasan brosur, leaflet, poster dan spanduk dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kearifan lokal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan.

REFERENSI

- Anonim. (2013). Data Monografi Desa Latuhalat. Kecamatan Nusaniwe. Ambon: Pemerintah Desa Latuhalat.
- _____. (2014). Makalah alasan manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi.

 http://aisyaadministrasi13.blogspot.co.id/2014/10/makalah-alasan-manajemen-dibutuhkan.html. Diakses pada Tanggal 25 Februari 2017.
- Arnawa, K. I B Purnama., & Gede M.A. (2016). Dampak bantuan sarana perikanan tangkap terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Jurnal manajemen agribisnis*, vol. 4, no. 1 ISSN: 2355-0759.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. (2008). Profil sumberdaya kelautan dan perikanan. Data dan analisis sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Kusnadi. (2009). Perempuan pesisir. Yogyakarta: LKIS.
- Mutiara P. (2008). *Analisis efektivitas kelompok usaha bersama sebagai program pemberdayaan rakyat miskin perkotaan:* Studi Kasus di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Pace, R. Wayne & Don FFaules. (2006). *Komunikasi organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, M.A.D, Trisnani Dwi, H, Imam, T. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi unit penangkapan *purse seine di fishing base* PPP Muncar Banyuwangi Jawa Timur. *Jurnal Seintek Perikanan, vol.* 11(2): 120-128.
- Purba, H.H. (2008). Diagram *Fishbone* dari ishikawa. Web link:http://hardipurba.com/2008/09/25/diagram-fishbone-dari-ishikawa.html
- Saroinsong, R.P. (2012). Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan di Desa Kantong Kecamatan Word Kabupaten Minahasa Utara. ejournal.unsrat.ac.id
- Wahab & Azis. (2008). Anatomi organisasi dan kepemimpinan pendidikan: Telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan. Bandung: Alfabeta.

INDEKS JURNAL MATEMATIKA, SAINS, & TEKNOLOGI TAHUN 2017

Angka kematian ibu, 76

Arima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Bleng, 105, 106, 107, 108, 109

Chitosan, 105

Collective business group, 120

Community empowerment, 11

Composite flours-based dried noodle, 111

Dry waste, 28

Euthynnus affinis, 44

Exploitation rate, 44

Fishing, 44, 120, 128

Gravitasi, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103

Gravitoelectromagnetism, 95

Gravity, 95, 103, 104

Household waste, 28

Inflasi, 1, 2, 6, 8, 9, 10

Inflation, 1

Institutional management, 120

Karimunjawa, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55

Kawasan konservasi perairan, 45

Kelompok usaha bersama, 121, 128

Kerupuk gendar, 105, 106, 107, 108, 109

Kitosan, 105, 106, 107, 108, 109

Kuantum gravitasi, 95, 98, 100, 102

Laju eksploitasi, 44, 45, 46, 53, 54

Leaf vegetable, 36

Manajemen kelembagaan, 121, 128

Manufacture embankment, 11

Marine protected area, 44

Medan lemah, 95, 96, 97, 100, 101

Mi kering berbahan baku tepung komposit, 111, 112, 116, 117, 118

Nilai gizi, 36, 37, 38, 39, 42, 108

Packaging, 111, 118, 119

Participatory rural appraisal, 120, 121

Pemberdayaan masyarakat, 12, 24, 26

Pemberian insentif, 12, 21, 23, 24, 25, 26

Pembuatan tanggul, 12, 24, 25, 26

Penerimaan konsumen, 112, 113, 116, 118

Pengemasan, 112

Pengembangan produk, 112, 116

Penguatan, 25, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128

Peramalan time series, 1, 2

Perguruan tinggi, 59, 63

Perikanan tangkap, 54, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128

Pertanian perkotaan, 21, 22, 24, 36, 37, 38, 39

Product development, 111

Provision of incentives, 11

Quantum gravity, 95, 96

Rice cracker, 105, 110

Sampah basah, 28, 32, 35

Sampah kering, 28, 32, 35

Sampah rumah tangga, 28, 32, 34, 35

Sayuran daun, 36, 37, 40, 42

Scomberomorus commerson, 44

Tenggiri, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54

Time series forecasting, 1

Tongkol, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Urban agriculture, 36

Weak field, 95

Wet waste, 28

INDEKS PENULIS JURNAL MATEMATIKA, SAINS, & TEKNOLOGI TAHUN 2017

Agus Susanto, 11 Beti Cahyaning Astuti, 105 Dian Adi Anggraeni Elisabeth, 111 Diarsi Eka Yani, 56 Dody Ariyantho Kusma Wijaya, 28 Dwi Iriyani, 36 Ernik Yuliana, 44 Hartati, 1 Idha Farida, 56 Lilian Sarah Hiariey, 120 Ludivica Endang Setijorini, 56 Nesti Rostini Romeon, 120 Nurhasanah, 44 Nurul Huda, 56 Pangesti Nugrahani, 36 Ria Faulina, 68 Rivan Destyanugraha, 76 Robert Kurniawan, 76 Yuant Tiandho, 95

INDEKS PENYUNTING JURNAL MATEMATIKA, SAINS, & TEKNOLOGI TAHUN 2017

Untuk penerbitan Volume 18 Tahun 2016, semua naskah yang diserahkan kepada Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi (JMST) telah ditelaah oleh para pakar/mitra bestari/rekan setara berikut:

Mohamad Agus Setiadi (Institut Pertanian Bogor)

Sonny Suwasono (Universitas Jember)

Ariyanti Hartari (Universitas Terbuka)

Hurip Pratomo (Universitas Terbuka)

Djati Kerami (Universitas Indonesia)

Lina Warlina (Universitas Terbuka)

Sri Listyarini (Universitas Terbuka)

Herman (Universitas Terbuka)

Nurul Huda (Universitas Terbuka)

Susi Sulistiana (Universitas Terbuka)

Edi Rusdiyanto (Universitas Terbuka)

Diarsi Eka Yani (Universitas Terbuka)

Sitta Alief Farihati (Universitas Terbuka)

Nurmala Pangaribuan (Universitas Terbuka)

Ludivica Endang Setijorini (Universitas Terbuka)

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pakar/mitra bestari/rekan setara tersebut atas bantuannya